YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULATAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

NOVIA ERLIN
NPM : 167310606

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	Novia Erlin
Npm	:	167310606
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP.,MA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Novia Erlin
NPM	:	167310606
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

An. Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP.,MA

Sekretaris

Andriyus, S.Sos, M.Si

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 17 Desember jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Novia Erlin
NPM	:	167310606
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	IMPLEMNTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBRU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 9 STUDI KASUS DIPASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU.
Nilai Ujian	:	Angka : " 80,76 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1.
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3.

Pekanbaru, 17 Desember 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novia Erlin
N P M : 167310606
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : IMPLEMNTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBRU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 9 STUDI KASUS DIPASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU.

Struktur Tim :
4. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA. — Sebagai Ketua merangkap Penguji
5. Andriyus, S.Sos., M.Si. — Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
6. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. — Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :
5. Yth. Bapak Rektor UIR
6. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
7. Yth. Ketua Prodi.....
8. A r s i p --------sk.penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Novia Erlin
NPM	:	167310606
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Ketua	An. Tim Penguji Sekretaris
Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP.,MA	**Andriyus, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Indra Safri, S.Sos., M.Si	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian usulan penelitian ini yang berjudul. **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DIPASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU).** Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepadaNabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauldan danpengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Usulan penelitian ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu-ilmu social dan ilmu politik.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis ngucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi.,SH.,M.CL selakuRektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP.,MA selaku Dosen pembimbing penelitian saya yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepada kepala dinas pekerjaaan umum dan penata ruang kota pekanbaru beserta seluruh masyarakat kota pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian diwilayah tersebut serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini baik dan jelas.
7. Kepada kedua orang tua saya serta keluarga besar penulis, yang Selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan usulan penelitian ini. Kepada Sahabat saya Ratih Comel dan Mutiara endut yang telah memberikan dukungan kepada saya, untuk dery yang sudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan samangat Kepada saya dan serta Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 IPG yang saya bangangkan dan saya sayangi. Teman-teman telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan usulan penelitian. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pekanbaru17 November2020

Penulis

NOVIA ERLIN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

SURAT PERNYATAAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRAC ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah 1
B. Fenomena 13
C. Rumusan Masalah 14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. StudiKepustakaan 16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan 16
2. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah 18
3. Konsep Kebijakan 19
4. Konsep Impelementasi Kebijakan 20
5. Konsep Pengelolaan 22
6. Konsep Sampah 23
7. Konsep Pasar 24
8. Konsep Sarana dan Prasana 25
B. Penelitian Terdahulu 28
C. Kerangka Pikir 30
D. Konsep Operasional 31
E. Operasional Variabel 33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 35
C. Informan 35
D. Teknik Penarikan Informan 36
E. Jenis dan Sumber Data 36
F. Teknik Pengumpulan Data 37
G. Teknik Analisa Data 38
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 39
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian 40

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru 41
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 41
2. Keadaan Geografi 42
3. Kependudukan 43
4. Pemerintahan 43
5. Perekonomian 45
6. Budaya 46
7. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 46
B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekaanbaru 47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 60
1. Jenis Kelamin 60
2.Usia Informan 61
3.Pendidikan Informan 62
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah 62
C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Sampah 80

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Jumlah Volume Sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru 6
1.2 Jumlah Daftar Kendaraan Operasional 7
II.1 Penelitian Terdahulu 26
II.3 Operasional Variabel 31
III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 37
V.1 Klasifikasi Informan 58
V.2 Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Umur 59
V.3 Informan Berdasarkan Pendidikan 60

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

I.1 Bagan Alur 7

II.2 Kerangka Pikir 28

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulis Skirpsi Mahasiswa

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pengelolaan Sampah (Studi kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Novia Erlin
NPM	: 167310606
Program Studi	: IlmuPemerintahan
JenjangPendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah(Studi kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah–kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2020



Novia Erlin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

(Studi kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)

ABSTRAK

NOVIA ERLIN

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah. Tipe penelitian yang berlokasi di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru adalah tipe penelitian yang digunakan adalah metode tipe penelitian Kualitatif dengan cara *survey*,yaitu memperioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk mengamati kondisi lokasi penelitian. Terdapat key infoman dan informan pada penelitian ini yaitu kepala bidang pengelolaan sampah, seksi sarana dan prasarana, pihak ketiga, pedagang. Tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam menetapkan key infoman dan informan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data skunder yang di kumpulkan dengan menggunakan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah Cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY Number 8 of 2014 CONCERNING WASTE MANAGEMENT

(Case study at Arengka Morning Market, Pekanbaru City)

ABSTRACK

NOVIA ERLIN

This researcher aims to determine the obstacles faced by the Pekanbaru City Government in Waste Management. This type of research which is located in Arengka Morning Market, Pekanbaru City is the type of research used is the qualitative research type method by means of a survey, which prioritizes the interview list as a data collection tool and the data collected by this tool is then used as the main raw material for observing the conditions of the research location. There are key informants and informants in this study, namely the head of the waste management sector, the facilities and infrastructure section, third parties, traders. The three data collection techniques used in determining key information and informants are interview, observation and documentation techniques. Types and data collection techinques used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and results of field research and secondary data collected using reports and notes and documents. Based on this observing technique, assess and conclude that the implementation of the Pekanbaru City Regional Regulation on waste Management is quite good.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Management

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Bahwa Tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan Rakyat dan untuk mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia diberbagai Daerah. Pemerintahan sebagai Aparatur Negara yang mengatur urusan Kenegaraan Bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-daerah Provinsi dan dibagi ke Daerah–daerah Kabupaten/ Kota yang tiap Provinsi, Kabupaten dan Daerah mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang –Undang Dasar.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintahan Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Urusan Pemerintan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah pada pasal 10 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Absolut meliputi :

a. Politik Luar Negeri
b. Pertanahan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan Fisikal; dan
f. Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;dan
f. Sosial

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan Hidup
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatat Sipil
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan Informatika
k. Koperasi,Usaha Kecil dan Menegah
l. Penanam Modal
m. Kepemudaan dan Olahraga
n. Stastik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan;dan
r. Kearsipan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara itu adapun Pemerintahan pilihan meliputi :

a. Kelautan dan Perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energi dan Sumber Daya Mineral
f. Perdangan
g. Perindustrian
h. Transmigrasi

Tugas dan Fungsi Pemerintahan yaitu, Pemerintahan merupakan Suatu gejala yang berlangsung dalam Kehidupan Bermasyarakat yaitu Hubungan Antara Manusia dengan setiap Kelompok termasuk dalam Keluarga. Pemerintahan memegang Pertanggung Jawaban atas Kepentingan Rakyat dan juga Pemerintah adalah Semua beban yang Memproduksi, Mendistribusikan, atau Menjual alat pemenuhan kebutuhan Masyarakat berbentuk Jasa Publik dan Layanan Cipil .

Sementara itu Tugas Pemerintah adalah untuk Melayani dan Mengatur Masyarakat,dimana Tugas Pelayanan lebih menekankan Upaya Mendahulukan Kepentingan Umum, Mempermudah Urusan Publik dan memberikan Kepuasan Kepada Publik, sedangkan Tugas Mengatur lebih menekankan Kekuasaan Power yang melekat pada Posisi Jabatan Birokrasi .

Tugas Pokok Pemerintah Meliputi :

1. Menjamin Keamanan Negara dari Segala kemungkinan Serangan dari Luar, dan Menjaga agar tidak terjadi Pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan Pemerintahan yang Sah melalui cara-cara Kekerasan.
2. Memelihara Ketertiban dengan Mencegah terjadinya Pemberontakan diantara warga masyarakat, menjamin agar Perubahan apapun yang terjadi didalam Masyarakat dapat berlangsung secara Damai.
3. Menjamin di Terapkannya Perlakuan yang Adil Kepada Setiap Warga masyarakat tanpa membedakan Status apapun yang melatar Belakangin Keberadaan Mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Melakukan Pekerjaan Umum dan Memberikan Pelayanan dalam Bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan Oleh Lembaga Non Pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikejarkan Oleh Pemerintah.
5. Melakukan Upaya–upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial : Membantu Orang Miskin dan Memelihara Orang Cacat, Jompo dan Anak telantar, Menampung serta Menyalurkan para Gelandangan ke Sektor Kegiatan yang Produktif dan Semacamnya.
6. Menerapkan Kebijakan Ekonomi yang Menguntungkan Masyarakat Luas, seperti Mengendalikan Laju Inflasi, Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja Baru, memejukan Perdagangan Domestik dan antar Bangsa. Serta Kebijakan lain secara Langsung Menjamin Peningkatan Ketahanan Ekonomi Negara dan Masyarakat .

Jadi secara Deskripsi Tugas Pemerintahan adalah Untuk Melayani dan Mengatur Masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut Bahwa Tugas Pelayanan lebih menekankan Upaya mendahulukan Kepentingan Umum, Mempermudah Urusan Publik dan Memberikan Kepuasan Kepada Publik, sedangkan Tugas Mengatur lebih Menekankan Kekuasaan Power yang Melekat pada Posisi Jabatan Birokrasi (Kaufman dalam Thoha,1995;101).

Sedangkan Fungsi Pemerintah yaitu :

1. Pemerintahan mempunyai Fungsi Primer atau Fungsi Pelayanan (service) sebagai Provider Jasa Publik yang baik di Privatisasikan dan Layanan Cipil termasuk Layanan Birokrasi .
2. Pemerintahan mempunyai Fungsi Skunder atau Fungsi Pembedayaan (empowerment), sebagai Penyelenggara Pembangunan dan melakukan Progam Pemberdayaan (Ndraha ,20011;85)

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Pemerintahan Daerah berwenang untuk Mengatur dan Mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya menurut Azaz Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian Otonomi yang Seluas-luasnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepada Daerah dimaksudkan untuk memepercepat Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Menciptakan Suatu Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seiring dengan Adanya Pemerintah yang Baik tersebut, maka sistem Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah pada Era Otonomi saat ini sudah seharusnya memperhatikan Prinsip-prisip Demokrasi, dan Pemberdayaan, Pelayanan, Trasparansi, dan Akuntabilitas, Partisipasi, Kemintraan, Desantralisasi, Konsistensis Kebijakan,dan Kepastian Hukum

Setiap Daerah dipimpin Oleh Kepala Daerah yang disebut dengan Gubernur untuk wilayah Provinsi, Walikota untuk wilayah kota, dan Bupati untuk wilayah kabupaten. Kepala Daerah Berwenang untuk Membuat Peraturan demi melaksanakan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerahnya. Dalam pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan Daerah sering berhadapan dengan Permasalahan-permasalahan seperti masalah Sosial, Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban Umum.

Salah satu Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru adalah Permasalahan terhadap Penanggulangan Tumpukan Sampah yang mana Permasalahan ini termasuk Kepada Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar pada Bidang Lingkungan Hidup. Sampah adalah Sisa Kegiatan Sehari-hari Manusia dan atau Proses Alam yang Berbentuk Padat, dengan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru yang Berjumlah Sekitar 1.159.234 Jiwa serta Perkembangan Zaman yang Membuat Pola Hidup Manusia dan Kebutuhan Masyarakat dalam semakin Meningkat,maka Jumlah Penggunaan Barang Semakin Bertambah dan Secara tidak Langsung Barang yang digunakan oleh Masyarakat tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdampak pada Peningkatannya Volume,Jenis dan Karakteristik Sampah yang dihasilkan Masyarakat tersebut.

1.1 Jumlah Volume Sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru

NO	KECAMATAN	JUMLAH Perbulan
1	Payung Sekaki	450,31 Ton
2	Tampan	1,021,15 Ton
3	Bukit Raya	428,48 Ton
4	Lima Puluh	387,55 Ton
5	Marpoyan Damai	1,445,29 Ton
6	Tenayan Raya	54.44 Ton
7	Pekanbaru Kota	324,44 Ton
8	Rumbai	201,56 Ton
9	Rumbai Pesisir	234,47 Ton
10	Sail	119,25 Ton
11	Senapelan	309,994 Ton
12	Sukajadi	557,48 Ton

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018

1.2 Jumlah Volume Sampah di PasarPagi Kota Pekanbaru

Lokasi	*Jumlah*
PasarPagiArengka	*12 ton perhari*

SumbarData : PT. GodangTua Jaya 2020

Meningkatnya Produksi Sampah yang dihasilkan Setiap Harinya dapat berakibat pada Penumpukan Sampah apabila Pemerintahan Lambat Mengantisipasi, Jumlah Sampah yang dihasilkan Masyarakat setiap hari haruslah dapat ditampung oleh Tempat Penempungan Sementara (TPS) dan Mobil Pengakut Sampah,karna apabila tidak Memadai dan juga Mobil Pengangkut Sampah tidak dapat Mengangkut semua Sampah yang ada tentunya akan ada Sampah yang Tersisa yang tidak Terangkut dan akan terus Bertambah Setiap harinya, apabila hal ini dibiarkan terus menerus tentu saja dapat Berdampak di Permasalahan Kesehatan dan Kerusakan pada Lingkungan Hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.2 : Jumlah Daftar Kendaraan Operasional

No	Nama Kendaraan	Jumlah
1.	Dump Truk 125 hp	22 Unit
2.	Armroll	7 Unit
3.	Tronton 155 hp	3 Unit
4.	Pick Up	6 Unit
5.	Backhoe Loader	2 Unit
6.	Becak Motor	7 Unit

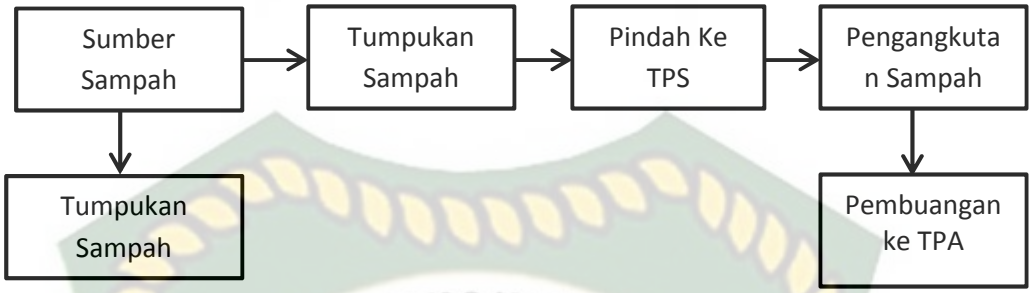
Sumber Data: PT. Godang Tua Jaya 2019

Salah satu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Mananggulangin Penumpukan Sampah adalah dengan Pengelolahaan Sampah. yang mana Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang Sistematis, Menyeluruh dan Berkesinambungan yang meliputi Kejadian Pembatasan timbulan Sampah, Pendaur, Pengumpulan, Penganggukutan, Pengelolaan, sehingga Pemprosesan Akhir Sampah. Adapun Standar OPerasional Prosedur Pengelolaan Sampah Berdasarkan jadwal yaitu:

- Penyedian Membuat rencana kerja Pengakutan Sampah
- Pengakutan sampah yang dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah di sepakati
- Pengakutan seluruh Sampah dari TPS yang terletak pada jalur jalan protokol atau sejenis sudah harus diangkut Ke TPA setiap hari
- Untuk pengakutan sampah rit 2(dua) dan 3(tiga) menuju TPA, waktunya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat
- Pengangkutan sampah baik langsung maupun tidak langsung diangkut ke TPA Muara fajar pada hari yang sama
- Jam Operasional TPA muara fajar 24 jam
- Apabila ada timbulan sampah dan menggangu kondisi lingkungan setempat penyedian wajib mengakut sampah menjadi sampai tidak tersisa
- Membuat dan menyampaikan Laporan harian, mingguan dan bulanan pengakutan sampah berupa laporan pengakutan di area pelayanan, ritasi serta rute pengakutan sampah kepada PPTK.
- Penyedia menyampaikan jadwal Operasional dan pemeliharaan kendaraan yang beroperasi sejak mulai kontak ditandatagani oleh kepada PPK.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

GAMBAR 1.1: BAGAN ALUR PENGELOLAAN SAMPAH



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Bahwa dari Sumber Sampah tersebut dihasilkan dari Sekumpulan Pedagang atau Masyarakat yang berada diKawasan Lingkungan Pasar, kemudian dari Sumber Sampah tersebut diKumpulkan oleh Petugas Kebersihan Pasar yang telah ditentukan untuk dibawa atau dipindahkan ketempat Pengumpulan Sampah atau yang dikenal dengan TPS yang telah disediakan. Dari TPS tersebut Sampah yang terlah terkumpul diangkut atau dijemput Oleh Armada yang disediakan oleh Pemerintah kemudian dibawa ketempat Pembuangan Akhir (TPA)

Dalam memaksimalkan pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru secara Komprehensif, Pemerintahan Kota Pekanbaru menetapkan Suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolahaan Sampah. Sehingga, Pemerintah Daerah beserta Dinas terkait diharapkan Mampu untuk Melakukan Penanganan dan Pengelolaan Sampah-sampah di Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, di dalammnya di sebutkan Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah yang meliputi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menumbuh Kembangkan dan Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
b. Melakukan Penelitian, Pengembangan Teknologi, Pengurangan dan Penanganan Sampah
c. Memfasilitasi, Mengembangkan dan Melaksanakan upaya Pengurangan, Penanganan, dan Pemanfataan Sampah
d. Melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Memfasilitasi Penyedian Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
e. Mendorong dan Memfasilitasi Pengembangan manfaat dari Pengelolaan Sampah
f. Memfasilitasi Penerapan Teknologi Spesifik Lokal yang Berkembang pada Masyarakat setempat untuk Mengurangi dan Menangani Sampah melakukan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha agar tetap Keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah

Kemudian pada Pasal 3 didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan Bahwa tujuan dari Pengelolaan Sampah tersebut, yaitu :

a. Mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Bersih
b. Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
c. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah di Daerah;dan
d. Menjadikan Sampah sebagai Sumber Daya yang memiliki Nilai Tambah

Dalam Pelaksanaan, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Kewenangan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagaimana yang Tertara pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa Bidang yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Program
3. Bidang Tata Lingkungan Terdiri dari :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

   a. Seksi Investarisasi dan Perencanaan Lingkungan
   b. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
   c. Seksi Konservasi Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah
   a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
   b. Seksi Penanganan dan Pemprosesan Akhir Sampah
   c. Seksi Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan berbahaya Terdiri dari :
   a. Seksi Penataan Lingkungan
   b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
   c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Terdiri dari :
   a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
   b. Seksi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Lingkungan
   c. Seksi Retribusi dan Penagihan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksanaan Jabatan (UPT)

Untuk Urusan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi“Bidang Pengeloaan Sampah Mempunyai Tugas membantu Sebagian Tugas Kepala Dinas dalam Melaksanakan Sub Urusan Pengelolaan Sampah ‘’ Selanjutnya pada pasal 15 ayat(2) dijelaskan mengenai Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah yang berbunyi``Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Target Pengurangan Sampah
b. Perumusan dan Penetapan Target Pengurangan Sampah
c. Pembinaan Pembatasan Timbunan Sampah, Penggunaan Bahan Baku Produksi dan Lemasan yang mampu diurai oleh Proses Alam, Pendarulangan Sampah dan Pemanfaatan kembali Sampah dari Produksi dan Kemasan Produk
d. Perumusan Kebijakan Penanganan dan Pemprosesan Akhir Sampah Tingkat Kota
e. Pelaksanaan Kebijakan Penanganan dan Pemprosesan Akhir Sampah Tingkat Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Pelaksanaan Koordinasi Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemprosesan Akhir Sampah
g. Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembungan Akhir (TPA)Sampah
h. Pengawasan Terhadap Tempat Pemprosesaan akhir dengan Sistem Pembuangan Open Dumping
i. Perumusan Sistem tanggap darurat Pengeloaan Sampah
j. Perumusan Pemberian Kompensasi dampak Negatif kegiatan Pemprosesan Akhir Sampah
k. Pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten/ Kota lain dan Kemitraan dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah
l. Pengembangan Investasi dalam Usaha Pengelolaan Sampah
m. Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Perizinan Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemprosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
n. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain(Badan Usaha)
o. Pelaksanaan Perencanaan, Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendaur ulangan Sampah dan Sarana Prasarana Penanganan Sampah
p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya .

Dalam Pelaksanaannya, Kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pihak Ketiga secara sistematis dengan memfokuskan kepada upaya mengurangi tumpukan Sampah yang mana Mekanismenya adalah Pemilihan Sampah, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemprosesan Akhir Sampah.

Latar Belakang dari PT. Godang tua Jaya berdiri sejak Tahun 1993 yang bergerak di bidang :

- Jasa Kontraktor baik konstruksi sipil, pekerjaan Tanah maupun berbgai kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Pemborongan.
- Pengelolaan Sampah TPS BantarGebang sejak 05 Desember 2008
- Pengelolaan Sampah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jasa Pengelolaan Sampah Untuk PD Pasar Jaya, Jakarta.Tahun 2008-2009
2. Jasa pegelolaan sampah untuk Pd pasar jaya, jakarta. Tahun 2009-2010
3. Jasa pengelolaan sampah Arm Roll Jakarta Pusat. Tahun 2011-2012
4. Jasa swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamata tanjung Priok. Tahun 2012-2013
5. Jasa Swastanisasi penanganan kebersihan kecamatan tanjung priok. Tahun 2013
6. Pekerjaan Penanganan Jasa Kebersiha oleh swasta dikecamatan senen,Jakarta Pusat Tahun 2014
7. Pekerjaan penanganan jasa kebersihan oleh swasta dikecamatan Gempir, Jakarta Pusat. Tahun 2014

Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan Kotrak Kerja yang diberikan Oleh dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan Pihak Ketiga Pt. Godang Tua Jaya dari dari Tanggal 15 Agustus 2018-31 Desember 2020. Tujuan Kontrak ini adalah :

- Melakukan Pelayanan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan melaksanakan pekerjaan jasa pengakutan persampahan zona 1 dari sumber Sampah ketempat Pembuagan akhir(TPA) Muara fajar

Keterbatasan Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru Khususnya dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru secara Efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang bersih, hijau, dan nyaman. .

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru saat ini telah menerapkan Kebijakan dalam Upaya Pengembangan Pengeloaan Sampah antara lain :

1. Pengurangan Sampah dimulai dari Sumbernya melalui pembatasan timbulnya sampah
2. Peningkatan peran aktif Masyarakat dan dunia Usaha/ Swasta sebagai Mitra dalam pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Meningkatkan akses Pelayanan dan Pemanfaatan Sampah
4. Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pengeloaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 jenis Sampah ada 3 Jenis yaitu :

1. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
2. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya .

Melihat dari Sarana dan Prasarana yang ada didalam Bab IV Perda Nomor 8 Tahun 2014 Paragaf 1 Pasal 25 dalam Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah antara lain :

A. Tempat Sampah /Wadah Sampah
B. TPS /TPST
C. TPS 3R
D. TPA
E. Gerobak Sampah;dan/atau
F. Kendaraan Pengangkutan Sampah

B. Fenomena

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Penulis Menumakan beberapa Fenomena terhadap Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru :

1. Kurangnya Fasilitas Tempat Sampah atau Wadah Sampah yang berjumlah satu tersebut Sehingga Penumpukan Sampah yang Banyak dan Mengakibatkan Mengeluarkan Aroma tidak sedap.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kegiatan yang dilakukan Beberapa Armada/Kendaraan Pengakutan Sampah yang Kurang Baik dalam Pengakutan Sampah Karena Mobil angkutan Sampah tidak sesuai dengan jumlah Volume Sampah.

C.Rumusan Masalah

Latar Belakang dan Fenomena Empiris yang telah penulis jelakaskan diatas, Maka dari itu Penulis Tertarik untuk melakukan Penelitian lebih Lanjut lagi dengan Menganggkat judul **‘’Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pasar Arengka Pagi Kota Pekanbaru?”**

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pada Prasarana dan Sarana (studi kasus Pasar pagi arengka)

b. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah .

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritas Penelitiaan ini diharapkan mampu meningkatkan Pemahaman akan Kemapuan Akademis dan Ilmiah dalam melihat Kinerja Pelayanan.

b. Hasil Penelitian Ini juga diharapkan sebagai bahan Informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Secara Praktis, Bahwa dari hasil pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pembahasan mengenai Pengelolaan Sampah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BABII

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan sebagai salah Satu cabang Studi Ilmu Sosial memiliki banyak arti, sebagaimana ahli memberikan pengertian dalam arti luas yaitu menurut montesque pemerintahan adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan trias potical, baik itu legislatif (yang membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Ilmu Pemerinntahan Menurut Ndraha (dalam syafiie,2011;8) adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebetuhan dan tuntukan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan Pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.kemudian ndraha (2005;36) Pemerintahan adalah semua badan atau Organisasi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat .

Sedangkan menurut Syafiie, (20011;23) Ilmu Pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), Kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahan)dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya secara baik dan benar. Pemerintahan adalah Suatu ilmu dan Seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan Kharismatik menjalankan roda Pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin Ilmu Pengetahuan adalah Karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari,dan diajarkan sistematis serta spesifik/ khas (syafie,2011;20)

Dengan demikian Menurut Syafiie, (2011;10) Ilmu Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpi bidang Legislasi, Yudikasi, dan Eksekusi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar Lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala Pemerintahan. Pemerintah melakukan Pelayanan kepada Masyarakat dan mengantisipasi dekadensi Moral dengan Kekuasaan negara yang dimiliki.

Sedangkan Menurut Iver dalam Syafi'ie (2005:22-23) Mengatakan Pemerintahan itu adalah Suatu Organisasi dari Orang-orang yang mempunyai Kekuasaan, jadi Ilmu Pemerintahan adalah Sebagai Suatu Ilmu tentang Bagaimana manusia adalah Perintah. Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan Pengurusan (eksekutif), Kepemimpinan dan Koordinasi secara Baik dan Benar.

Menurut Labolo (2007: 24) Pemerintahan Sesungguhnya merupakan Upaya Mengelola Kehidupan Bersama secara Baik dan Benar guna mencapai Tujuan yang disepakati/ diinginkan bersama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah Aspekpenting seperti Kegiatan (dinamika), Sturktur Fungsional, maupun Tugas dan Kewenangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah

Menurut Erlina (2005;2) Pemerintahan adalah Organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan Kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti Luas merupakan Suatu yang lebih besar dari pada Suatu Kementrian yang diberi Tanggung Jawab memelihara Perdamaian dan Keamanan Negara .

Sedangkan Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dalam Pradigma lama memiliki Objek Material Negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, Namun Dalam Pradigma baru Pemerintahan dipandang memiliki Objek materialnya masyarakat, sehingga Pemerintahan dimaknai sebagai Suatu Proses menata Kelola Kehidupan Masyarakat dalam suatu Pemerintahan /Negara .

Menurut Maulidiah (2014;4) Pemerintahan memiliki Tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok Pemerintah, Ketiga fungsi hakiki Pemerintah tersebut, yakni memberikan Pelayanan Kepada masyarakat (service), memberdayakan segala Potensi yang dimiliki (empowermant), serta melaksanakan Pembangunan (development)

Menurut Ryas Rasyid (dalam Maulidiah,2014;4) Tugas Pokok Pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowernment)
3. Pembangunan (development)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah Sekumpulan Keputusan yang diambil oleh Seorang Pelaku atau Kelompok Politik dalam usaha memelih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada Prinsipnya, Pihak yang membuat Kebijakan-kebijakan itu mempunyai Kekuasaan untuk melaksanakan. (Miriam Budiarjo 2008 ;20)

Menurut Dye dalam (Leo Agustino,2008;7) Mengemukakan bahwa, Kebijakan Publik adalah apa yang dipilih oleh Pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friendrich dalam (Leo Agustino 2008;7) mengartikan Kebijakan sebagai serangkaian Tindakan atau Kegiatan yang diusulkan oleh Seseorang, atau kelompok atau Pemerintah dalam Suatu lingkungan tertentu.

Friendrich (dalam Wahab 2004;3) Kebijakan adalah Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang kelompok atau Pemerintah dalam Lingkungan tertentu sehubung dengan Adanya Hambatan-hambatan tertentu seraya mencari Peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan .

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari progam – progam pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk progam-progam dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier(dalam Wahab,2001;68) Implementasi Kebijakan adalah Pelaksanaan Keputusan Kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang . Namun dapat pula berbentuk Perintah-perintah atau Keputusan Eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, Keputusan tersebut mengedentifikasi masalah yang ingin diatasi, menebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses Implementasi.

Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agoestino,2006;139) Implementasi Kebijakan yaitu sebagai tindakan–tindakan yang dilakukan baik oleh Individu-individu atau Pejabat-pejabat atau Kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada Tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Kebijakan. Adapun Implementasi Kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/ Kecendurangan (Disposition) paraPelaksana
5. Komunikasi Antar oganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Ripley dan Franklin(1986;232) dalam Bukunya yang berjudul Policy Implementation and Bureaucracy, Menulis tentang Tree Conceptions relating to successful Implementasion. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya Implementasi Kebijakan, Yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Tingkat Kepatuhan

   Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (the degree comliance on the statute), tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkah Kepatuhan terhadap isi Kebijakan dengan mandat yang telah diatur

2. Lancarnya Pelaksanaan

   Lancarnya Pelaksanaan rutinitas fungsi,(smoothly functio0nning rouctoning routine and the absence of problem),Keberhasilan Implementasi Kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi

3. Kinerja dan Dampak

   Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki (the leadingof the desired performance and impact), Bahwa dengan adanya Kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan Implementasi Kebijakan .

Kebijkan perspektif tersebut digunakan untuk mengukur Keberhasilan Implementasi Kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidenntifikasi. Menurut Sumaryadi Implementasi Kebijakan adalah Keadaan dalam Proses Kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapakan(direncanakan) oleh pembuat Kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari Pelaksanaan Kebijaksanaan), Perbedaan tersebut tergantung pada Implementation capacitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang di percayai mengembangkan tugas Implementasikan Kebijaksanaan tersebut (dalam Sumaryadi,2005;80).

5. Konsep Pengelolaan

Kamus Besar Indonesia (1997) Kata Pengelolaan berasal dari kata dasar "kelola" yang artinya Mengurus suatu Usaha (Perumusan, Pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti dari Pengelolaan itu sendiri adalah Proses, cara Perbuatann mengelola; Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain, Proses yang membantu Kebijaksanaan dan tujuan Organisasi, Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Pencapaian tujuan .

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982;124) mendefinisikan Pengertian Pengelolaan adalalah Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian atas semua sumber data yang diperlukan untuk pencapaian semua tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Adisasmita (2001;22) Mengatakan Bahwa Pengelolaan tidak hanya melaksanakan serangkai Kegiatan, akan tetapi merupakan Kegiatan yang berdasarkan fungsi-fungsi Menajemen,seperti: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan untuk mencapai tujuan secara Efektif dan Efesien .

Pengelolaan adalah Sesuatu rangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang Pelaksanaan (Purwanto,2009) Pengelolaan adalah Pemanfataatan Sumber Daya manusia ataupun sumber daya lainya yang diwujudkan dalam Kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengarahan dan Pengawasan untuk mencapai Suatu tujuan tertentu (Geprge R.Terry).

Menurut Pramuji Pengelolaan menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

1. Pengelolaan sebagai pebangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi .
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu Usaha untuk memelihara agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Moekijat (dalam Adisasmita 2011:21) mengemukakan bahwa Pengelolaan adalah Suatu proses tertentu yang terdiri dari Perencanaan, Pengornisasian, Pengerakkan, dan Pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.

6. Konsep Sampah

Menurut Definisi World Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yangtidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari sisa kegiatan manusia

Sampah di definisikan Sebagai Suatu yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang,yang dihasilkan oleh-oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, Sampah dapat berasal dari Kegiatan Industri, Pertambangan, Pertanian, Perikanan, Transportasi, Rumahtangga, Perdangangan, dan Kegiatan manusia lainnya (manik 2007;67)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 Menyatakan Sampah adalah Sisa kegiatan Sehari-hari manusia atau Proses alam berbentuk padat.Selanjutnya, Pengertian yang serupa tentang Sampah adalah Suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi yang berasal dari aktifitas manusia.

Menurut Mochtar (1987;55) Sampah adalah Sesuatu yang tidak digunakan tidak dipakai dan tidak disenangi yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa golongan Mochtar (1987;55) yang didasarkan pada asal :

a. Pasar, tempat-tempat Komersial
b. Pabrik-pabrik atau Industri
c. Rumah tinggal Kantor, sekolah,industri, gedung-gedung umum
d. Jalan, lapangan dan pertanian
e. Sekolah
f. Dan lain sebagainya .

Pengeloaan Sampah adalah Pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan, pendaur-ulangan atau Pembuangan dari Material Sampah. Pengelolaan Sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan Sampah juga bisa melibatkan zat padat, cair. Dengan metode keahlian Khusus untuk masing-masing zat .

7. Konsep Pasar

Menurut Mankiw (2007) Pasar adalah Sekumpulan Pembeli dan Penjual dari sebuah Barang atau Jasa tertentu. Para pemnbeli sebagai sebuah Kelompok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menentukan permintaan terhadap produk dan Para Penjual sebagai Kelompok yang menentukan penawaran terhadap Produk(Zayinul Fata, 2010)

Pasar dalam Pengertian teori Ekonomi adalah suatu siatuasi dimana Pembeli (Konsumen)dan penjual (Produsen dan Pedagang) melakukan transanksi setelah kedua Pihak telah Mengambil Kata sepakat tentang Harga terhadap sejumlah (kauantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi.

Pasar dapat terbentuk dengan Adanya syarat-syarat yaitu Adanya Penjual,adanya Pembeli, tersedianya Barang yang Tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan Pembeli (konsumen) memiliki kegiatan Ekonomi masyarakat.

Pasar adalah Tempat Perjumpaan antara Pembeli dan Penjual, di mana Barang/ Jasa atau Produk dipertukarkan antara Pembeli dan Penjual. Ukuran kerelaan dalam Pertukaran tersebut biasanya akan muncul Suatu tingkat harga atas Barang dan Jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenberg dan Smith 2003).

8. Konsep Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Indonesia KBBI menyatakan Bahwa Sarana adalah Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.dan Prasarana adalah Segala sesuatu yang yang merupakan penunjang Utama terselenggaranya Suatu Proses.(Usaha, Pembangunan, Proyek).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Prasana adalah Kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastuktur metunjuk pada sistem fisik yang menyediakan tranportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonomi (Grigg,1998 dalam Kodoatie,2005:8)

Menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) Prasana merupakan suatu faktir potensial yang sangat penting dalamm menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasana yang memandai, prasana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggarakannya suatu proses atau kegiatan dalam kota pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota .

Prasarana lingkungan merupakan kelengakapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Prasana dan sarana lingkungan yang utama fungsingnya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang,mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran hujan untuk mencegah banjir setempat .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fungsi Prasarana adalah Untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryo,1996 dalam Juliawan,2015:6)

a. Tujuan Penyedian Prasarana

Penyedian prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan dengan sesuai rencana. Prasarana bertujuan agar ruang-ruang yang diperuntunkan bagi kegiatan publik dapat berfungsi dengan baik. Penyedian prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarkat dapat tertampung dengan baik. Penyedian prasarana perkotaan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan dasar saja, tetapi juga untukk terselenggaranya fungsi kota dalam konteks perkotaan. Ketersediaan prasarana berbagai jaringan yang menyatukan berbagai wilayah secara nasional dan ketersediaan prasarana wilayah pada kawasan-kawasan perbatasan mendukung aspek persatuan dan kesatuan. Prasarana juga ddapat dimudahkan kerja sama pertukaran barang antar wilayah dan dapat memudahkan kerja sama pertukan barang antar wilayah dan dapat memberikan akses yang merasa terhadap fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah .

b. Manfaat Prasarana

Berikut ini beberapa manfaat dari pegadaan prasarana atau infrastruktur terhapat suatu wilayah :

a. Membantu menambah daya dukung lingkungan, atau mengurangi beban lingkungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Melestarikan alam lingkungan .
c. Mendukung kegiatan.
d. Meningkatkan interaksi sosial, ekonomi, kebudayaan
e. Mengurangi jarak dan waktu, memudahkan, meringkankan pembiayaan
f. Mempresentasikan kemampuan suaut wilayah .

B.Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliatan \ Tahun	Judul Penelitan	Ukuran	Persamaan	Perbedaan
Widia Wira Dinata / 2015	Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Baik	a. Meneliti mengenai Pengelolaan Sampah	a. Peneliti inilebih membahas mengenai sistem Pengelolaan Sampah, sedangkan Peneliti saya lebihke Implementasi Pengelolaan Sampah ke Sarana Prasarana b. Peneliti ini menggunaka-n Perda Tahun 2000, sedangkan Penelitian saya menggunakan Perda terbaru Tahun 2014 c. Lokasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

				Berbeda d. Teori Berbeda
Setia Fajar Maulana / 2007	Evaluasi pelaksanaan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Sampah (studi kasus dikecamatan Tampan)	Terlaksana	a. Meneliti mengenai Pengelolaan Sampah b. Dinas yang berwenang dalam Pengelolaan Sampah c. Menggunkan Peraturan Daerah yang sama	a. Peneliti sebelumnya lebi fokus kepada Pelaksanaan Perda, Sedangkan saya lebih mengakaji mengenai kebijakan Pengelolan Sampah b. Lokasi Penelitian berbeda c. Teori berbeda
Rienda Rielasari / 2018	Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru	Kurang Maksimal	a. Meniliti mengenai Pengelolaan Sampah	a. Peneliti sebelumnya lebih membahas mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, sedangkan Penelitian saya lebih membahas tentang Pengelolaan Sampah bagian Sarana dan Prasana b. Lokasi berbeda c. Teori Berbeda

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C.Kerangka Pikir

Gambar II.2 : Kerangka Pikiran tentang Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)



Sumber : Modifikasi Peneliti Terdahulu Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Untuk Lebih Memperjelas Konsep Teori yang telah penulis paparkan dimuka, maka penulis mengeporasionalkan Konsep teoritas tersebut untuk mempermudah dan memperjelas pemahanaman dalam penelitian .

1. Implementasi merupakan Suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya .
2. Peraturan Dearah yang dimaksud disini adalah Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 tahunmenjadi lebih bernilai Proses perencanaan, Pengeorganisasian, Penggerkan dan Pegawasan agar tercapainya tujuan.
3. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau Proses alam yang berbentuk padat.
4. Tempat Sampah adalah semua Tempat atau Wadah yang khusus untuk menetapkan Pengumpulan Sampah.
5. Tempat Pembungan Sampah (TPS) adalah Tempat Pembuangan sementara sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulangan ,Pengelolaan ,dan atau tempat Pengelolaan dan Pemprosesan Akhir .
6. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bagian bidang Pengelolaan Sampah Seksi Sarana dan Prasarana
7. Lokasi yang dimaksud disini adalah Pasar Pagi Kota pekanbaru
8. Ukuran dan Tujuan Kebijakan adalah Bagaimana pelaksanaan dalam Pengolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. SumberDaya adalah Bagian dari Pelaksana Suatu Progam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10. Karakteristik Agen Pelaksana Yaitu pelaku dari pelaksana Progam Pengelolaan Sampah
11. Sikap/ Kecendurangan yaitu Suatu keberhasilan atau Kinerja dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan terhadap Implementasi
12. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana yaitu Komunikasi antara pihak-pihak yang terlimbat dalam Progam Pengelolaan Sampah
13. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yaitu Untuk menilai Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Tabel II. 3 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi adalah Tindakan–tindakan yang dilakukan baik oleh Indivdu-individu atau Pejabat-pejabat atau Kelomppk-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya Tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan Kebijakan(Van Meter dan Van Horn) (dalam Agoetino,2006;139)	Impelementasi Kebijakan	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Mengukur Keberhasil Kinerja Implementasi Kebijakan. b. Mencapai Tujuan Implementasi Kebijakan
		2. Sumber Daya	a. Tingkat Keberhasilan Proses Impementasi Kebijakan Sumber Daya b. Ketersedian Sarana dan Prasarana
		3. Karakteristik Agen Pelaksana	a. Reaksi dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Implementasi b. Organisasi yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan
		4. Sikap/ Kecendurungan	a. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Implementasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			Kebijakan b. Penolakan\ Penerimaan terhadap penerapan implementasi Kebijakan
		5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Koordinasi komunikasi antara pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan b. Koordinasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
		6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	a. Menilai Kinerja masyarakat terhadap implementasi kebijakan diliat dari segi ekonomi, sosial, dan politik b. Tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

Sumber : Modifikasi Penelitian Terdahulu Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENILITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian Ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif, dengan tipe Penelitian Deskriptif, yakni Penelitian ini dengan maksud dapat melakukan Pengkuran dengan cermat dan Komprehensif terhadap suatu Fenomena, kemudian Penelitian mengembangkan Konsep dan himpunanan data. (Bungin, 2008:27)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provisin Riau Khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dan Kawsan Lingkungan Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Karena masih banyak Sampah yang berserakan dan belum terjadinya Pengelolaan Sampah yang semestinya sehingga terindikasi bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah belum terlaksana dengan baik .

C. Informan

Informan adalah Orang yang memberikan Infoormasi tentang bagaimana Latar Belakang kondisi Penelitian. Adapun Nara sumber memberikan Jawaban pada Penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi Objek Pelaksanaan Mengenai Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Arengka ,adapun yang memberikan Informasi didalam penelitian ini yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NO	Nama	Jabatan	Informan/Key Informan
1.	Aidil.Putra, ST.,MT	Kepala Bidang Pengelolahan Sampah	Key Informan
2.	Syahriwandi	Seksi Sarana dan Prasarana	Informan
3.	Taufiqurahman	Pt. Godang tua jaya	Informan
4.	Masyarakat	Masyarakat	Informan
5.	Pedagang	Pedagang	Informan

Sumber : Observasi Peneliti 2020

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan motode *purpsive samping,* metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek\ situasi sosial yang diteliti, Sugiyono (2012:54)

Untuk mencari Jawaban atas permasalahan dalam peneliti ini penulis menggunakan informan\ responden yang bertindak sebagai sumber data dan indorman terpilh serta yang bersangkutan dengan peneliti ini.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data dan Informasi yang penulis peroleh secara Langsung dari responden melalui Penelitian Lapangan mengenai Pengelolaan Sampah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam Bank Sampah Sekolah. Pengambilan data ini melalui Wawancara dan Interview

2. Data Sekunder

Yaitu Data yang penulis peroleh dan kemudian untuk mendukung Tujuan penelitianini, baik melalui studi Keperpustakaan berupa buku, dokumen, maupun data yang di peroleh dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Obsevasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap Objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kegiatan-kegiatan mengenai Pengelolaan Sampah terhadap Sampah diPasar Pagi Arengka.
2. Wawancara, Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertayaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dan berkaitan dengan Penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu Teknik Pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini didalam bentuk foto, gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan dan sebenarnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Teknik Analisi Data

Menurut Milles dann Huberman, Analisis data tertara dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susun tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah Kronologi. Berikut Tahapan dalam Analisis Data tertara :

1. Membanguan Sajian adalah Memecah-mecah Inovasi kedalam Komponen-komponen atau aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris Matriks. Kolom matriks adalah Jangka-jangka waktu, dari pengguna awal sampai penggunaan nanti, jika terjadi Perubahan dalam Komponen selama jangka Waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari Perubahan itu.
2. Memasukkan Data, Penganalisis ini sedang mencari Perubahan-perubahan itu dapat di tempatkan dalam catatan-catatan lapangan Wawancara dengan Para pengguna Inovasi yang sudah terkode. Yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat Suatu yang terkode dalam Format buku Inovasi. Kelanjutan Penyelidikan Menurut adanya Bagian-bagian yang telah ditambah, di drop, diperbaiki, digabungkan, atau seleksi digunakan.
3. Menganalisis Data, Penganalisis dapat Memahami lebih dalam Mengenai apa yang terjadi dengan mengacu Kembali pada Aspek-aspek lain dari Catatat Lapangan. Khususnya apalagi yang dikatakan Orang mengenai Perubahan itu atau alasan-alasannya. (Milles dan Huberman,2007:173-177).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jadwal waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitiaan Tentang Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2019/2020 Bbulan/Minggu															
		Nov-Des 2019				Jan-Feb 2020				Maret-April 2020				Mai 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyususnan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penyusanan Penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir yang Meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel

BAB III : Metode Penilitiaan yang Meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian, dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian .

BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian yang Meliputi Keadaan Geografis Penduduk, Keadaan Sosial, Kesahatan dan Keadaan Pemerintahan.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang Meliputi Identitas Responden, Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Bagaimana Pengurangan Dampak Negatif terhadap Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan yang diahadapi Pemerintah dalam Upaya Mencapai Tujuan Peraturan Daerah, Bagaimana Penetapan Waktu Pembuangan dan Pengakutan Sampah.

BAB VI : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Jauh sebelum disebutnya nama “Pekanbaru”Daerah yang merupakan inti Daerah Kota Pekanbaru sekarang, dikenal sebagai”Senapelan”. Asal nama Senapelan iniberasal dari nama pohon kayu “sena”. Daerah Senapelan meliputi Pekanbaru sekarang, Tampan, Palas, dan Sampai ke Kuala Tapung (bencah kelubi). Sebagaimana juga terdiri dalam Proses tumbuhnya perkampungan pada Umumnya di Indonesia yang mulai dengan Perladangan Persukuan, Senapelan juga awalnya dihuni Oleh kumpulan Masyarakat yang disebut Suku Senapelan.

Pada Tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam Wilayah Kampar Kiri yang di Kepalai oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru yang berstatus *Lanschap* sampai Tahun 1940. Kemudian menjadi Ibukota *onderafdeling* Kampar Kiri sampai Tahun 1942. Pekanbaru dikepalai Seorang Gubenur militer yang disebut Gokung.

Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang yang mana telah menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keadaan Geografi

Secara Geografis Kota Pekanbaru memiliki Posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa Kota besar seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan Wilayah Administratif. Kota Pekanbaru secara Administrasi berbatasan dengan Kabupaten sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sebelum Tahun 1960 Pekanbaru hanyalah Kota dengan Luas 16 km^2yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km^2 dengan 2 Kecematan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh selanjutnya pada Tahun 1965 menjadi 6 Kecamatan dan Tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan Luas Wilayah 446.50km^2, setelah Pemerintah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari Wilayah untuk Keperluan Perluasan Wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada Tahun 2003 Jumlah Kecamatan Kota ini dimekarkn menjadi 12 Kecamatan. Sekarang Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, dengan Luas 632,26km^2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kependudukan

Sejak Tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi Kota ke Empat berpendudukan terbanyak dipulau Sumatra, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru yang cukup besar, menjadi pendorong laju pertumbuhan pendududknya.

Etnis Minang Kabau merupakan Masyarakat terbesar dengan Jumlah sekitar 37.96% dari total Penduduk Kota. Selain itu etnis juga memeliki proporsi yang cukup besar adalah Melayu 26.10% , Jawa 15.70%, Batak 11.06% dan Tionghoa 2,5% dan lain-lain 6,7%.

Agama Islam merupakan Salah satu Agama yang Dominan dianut oleh Masyarakat Kota Pekanbaru sebersar 82.65%, sementara pemeluk AgamaKristen Protestan 10.39%, Budha 2.74% Katolik 3.82%, Konghucu 0.03%, dan Hindu 0.40% terdapat dikota ini.

Pada Tahun 2019 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru mencapai 900.465 Jiwa, yang memiliki kepadatan 1.642/km^2. Sekarang jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.091.088 jiwa, yang memeiliki Kepadatan 1.655km^2.

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara Administratif dipimpin oleh seorang Walikota dan didampingi oleh seorang Wakil Walikota. Pada tanggal 14 mei 1985 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat Roda Pemerintah jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1959, kembali ditunjuk Wan Abdul Rahman Walikota berikutnya, yang sebelumya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962, diganti oleh Tengku Bay, yang sebelumnya menjabat sebagaiBupati Indagiri. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai Walikota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan Oleh Drs. Abdul Rahman Hamid yang Memerintah lebih dari 10 Tahun.

Kemudian Pada masa berikutnya mulai diterapkan penerbitan Periode Pemerintahan Kota, dan pada tanggal 5 Juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada tanggal 21 Juli diganti oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Arpan, S.H., memerintahkan selama dua periode. Selanjutnya pada 1Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai Walikota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid yang memerintahkan lebih dari 10 tahun.

Kemudian Pada masa berikutnya mulai diterapkan Penertiban Periode Pemerintahan Kota, dan pada tanggal 5 Juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad S.H., Pada tanggal 21 Juli digatikan oleh Drs. Farouq Alwi, Berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H Oesman Effendi apan, S.H., memerintahkan selama dua Periode.

Pada tanggal 18 Mei 2011 untuk kedua kalinya diselanggarakan Pemilihan Walikota danWakil Walikota secara langsung oleh Masyarakat Kota Pekanbaru, H. Firdaus ST, MT menang dengan perolehan suara terbanyak, namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia hasil tersebut dibatalkan dan harus diadakan pemungutan suara ulang. Untuk mengisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kekosongan Gubenur Riau Drs. Rusli Zainal mengangkat Drs. H. Syamsurizal SE.,MM. Sebagai pelaksana tugas (plt) Wali Kota Pekanbaru.

Kemudian berdasarkan pemungutan suara ulang tanggal 21 Desember 2011, H Firdaus ST,MT kembali memenangi pemilihan Walikota Pekanbaru. H. Firdaus ST, MT masih memimpin Kota Pekanbaru sampai sekarang, tentunya dengan inovasi-inovasi baru yang dibangun di Kota Pekanbaru.

5. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat di pengaruhi oleh kehadiran Perusahaan Minyak, Pulp, Kertas, serta Perkebunan Kelapa Sawit beserta Pabrik pengelolahannya. Sektor Perdangan dan Jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamunya pembangunan ruko dijalan-jalan utama Kota Pekanbaru. Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, antara lain: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall Ska, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Cetral, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru, dan Living Word Pekanbaru. Dan juga beberapa Pasar Tradisional yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru antara lain: Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan(pasar kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima Puluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam Pertumbahan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3.82% dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri Logam, Mesin, Elektronika dan aneka, kemudian disusun industri Pertanian dan Kehutanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Budaya

Banyak Daerah yang menggunakan ornament kedaerahannya sebagai salah satu ciri atau identitas bangunan yang ada pada Daerahnya. Tidak jarang Simbol, Ornament, atau bentuk Khas Tradisional tersebut kehilangan makna yang terkandung di dalamnya. Fungsinya hanya sebagai tempelan Belaka, padahal faktanya Ornament dan Filosofi yang sangat dalam.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang merupakan garda terdepan di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan Kebudayaan Melayu, perlu dikaji mengenai penggunaan aplikasi langgam ersitekstur Melayu pada wajah kotanya, Khusunya sembayung sebagai ornament yang paling menonjol dalam perancangan di Kota Pekanbaru.

Pada bangunan Pemerintahan dan fasilitas umum, penerapan langgam arsitekstur tradisional Melayu Riau sebagian besar pada bentuk atap(belah bumbung) dan atau lebar layar lengkap dengan penggunaan ornament pada prabung atap, sudut atap (selembayung, sayap laying-layang dan bidai)

7. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani.”

Smart City adalah Kota yang Cerdas, yaitu Sebuah tatanan Kota yang menggunakan sistem Teknologi Informasi sehingga memudahkan di dalam Pengelolaan Kota dan Masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Madani adalah Kota yang memiliki Akhlak mulia, Peradan Maju, Modern, memilik kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang di demokratis dan di topang oleh supermasi hukum yang Berkeadilan, Berpendidikan Maju, Berbudaya Melayu, Aman, Nyaman, Damai, Sejahtera, Bertanggung Jawab serta Berlandasan Iman dan Takwa.

Dalam rangka pencapain visi yang telah di tetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang dimiliki, maka di tetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber daya manusia yang bertakwa, berkualitas, dan Budaya saing tinggi.
2. Mewujdukan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Kota Pekanbaru Kota cerdas dan menyediakan infrastruktur yang memadai.
4. Mewujdukan Pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi Padat modal, pada tiga Sektor unggulan yaitu, Jasa, Perdangan, dan Industry (olahan dan Mice)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan(*Green City*).

B.Stuktur Orgnisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fugsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kerbesihan Kota Pekanbaru terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Sub Bagian Progam

c. Bidang Tata ingkungan, membawahi:
   1. Seksi Investarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
   2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
   3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan;
d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
   1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
   2. Seksi Penanganan dan Pemproses Akhir Sampah;
   3. Seksi Sarana dan Prasarana;
e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pegelolaan Limbah Bahan beracun, membawahi:
   1. Seksi Pemanfaatan Lingkungan;
   2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
   3. Seksi Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun dan Limbah bahan berbahaya dan beracun;
f. Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitan Lingkungan Hidup, membawahi:
   1. Seksi Penegak Hukum Lingkungan;
   2. Seksi Peningkatan Kapasitas, informasi dan Komunikasi Lingkungan;
   3. Seksi Pelaksanaan Penagihan;
g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A.Fungsi dan Tugas Organisasi

Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai Tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainya.

Adapun Fungsi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu:

a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
b. Perumusan rencana kerja, progam dan kegiatan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksana kegiatan yang menjadi tugas pokok dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
d. Perumusan kebijkan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyeluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
e. Pemyeleggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;
f. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;
g. Penataan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewarganegaraanya;
h. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan dinas;
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
j. Pembinaan pegawai di lingkungan dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
k. Pengelolaan keuangan dinas;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuia dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan progam kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi sekretariat dinas lingkungan hidup dan kebersihan yaitu:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan progam dan anggaran dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru;
b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengorganisasian pelaksanaan progam birokrasi;
c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan progam;
d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban;
f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlenkapan gedung kantor;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri dari:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a.) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas merencanakan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan progam kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Sedangkan fungsi dan sub bagian keuangan yaitu:

1. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha tangga serta kearsipanserta
2. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi Peratura perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data dan informasi sub bagian umum
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait bidang tugasnya seta pelayanan hubungan masyarakat
4. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumha tangga dinas
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan pengganggaran, penggadaan, penerimaan, penyipanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah (BMD)
6. Pelaksanaan Kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin kepegawaian serta pengamanan lingkungan dinas
7. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan daftar urut kepengangkatan(DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilain prestasi kerja ASN dilingkungan Dinas
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpnan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya

b.) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan progam kerja sub bagian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsi yaitu:

1. Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan penata usahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan vertifikasi serta penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP)
3. Pelaksanaan penyiapan surat perintah pembayaran(SPP)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pelaksanaan vertifikasi harian atas penerimaan
5. Pelaksanaan vertifikasi laporan pertanggung jwaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Penyiapan dan pelaksanaan akuntasi dan penyusanan laporan keuangan dinas
7. Pelaksanaan penata usahaan aset meliputi pembukuan, inventasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c.) Sub Bagian Progam

Sub bagian progam mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan progam kerja sub bagian progam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsinya yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusanan rencana dan progam kerja serta perumusan kerja tahunan(RPK), penetapan kinerja, rencana kegiatan dan anggaran(RKA), laporan realisasi fisik program pembagunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja
2. Pengumpulan data dan informasi untuk mengembangkan dan kebutuhan sarana dan prasarana
3. Perumusan, pelaksanaan dan pengendalian dan pelaporan
4. Perumusan, Pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
5. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan laiinya
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas melaksanakan sub urusan tata lingkungan. Adapun fungsinya adalah:

a. Pelaksanaan intervariasi data dan informasi sumber daya alam;
b. Pelaksanaan penyusunan, pemantaun, evaluasi dan sinkronisasi (RPPLH) Tingkat kota dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kota;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbaris daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekorogion;
e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantuan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
f. Pelaksanaan penyusunan instumen ekonomi lingkungan hidup, rencana sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau keruskan lingkungan hidup;
h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal;
i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencanfangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan invertarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) dalam satu daerah kota;
l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesain konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;
m. Pengembangan sistem informasi dan pengellaan database keanekaragaman hayati;
n. Pelaksanaan pemantaun, penanggulangan dan pemulihan keruskan lingkungan;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

a. Seksi inventarisasi dan perencanaan lingkungan

Seksi inventarisasi dan perencanaan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dan tata lingkungan dalam melaksanakan sub urusan inventarisasi dan perencanaan lingkungan, sedangkan fungsinya, yaitu:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan intervensi data dan informasi sumber daya alam
2. Penyusunan dokumen rencana perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tingkat Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
4. Pelaksanaan inventarisasi, Pengkajian dan perencanaan penetuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi produk domestik, (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disentif dan pendanaanlingkungan hidup
6. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Penyusunan status lingkugan hidup daerah
8. Penyusunan indeks kualitan lingkungan hidup
9. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
10. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis(KLHS) tingkat kota
11. Penyusunan fasilitias keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS serta pembinaan dan evaluasi KLHS
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi ini mempunyai tugas membantu kepala bidang tata lingkungan dalam melaksanakan sub urusan kajian dan evaluasi dampak lingkungan, sedangkan fungsinya yaitu:

1. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan dan/ atau keruskan lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan dan analisis resiko lingkungan hidup)
2. Penilian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup
3. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilian , tim pakar, dan konsultan)
4. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup(UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan
5. Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Konservasi, Perubahan iklim Dan keruskan lingkungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Seksi ini mempunyai tugas membantu kepala bidang tata lingkungan dalam melaksanakan sub urusan konservasi, perubahan iklim dan keruskan lingkungan.
2. Seksi konservasi, Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi:
   a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
   b. Pelaksanaan pencandangan sumber daya alam yang tidak dapat dielola dalam jangka waktu tertentu.
   c. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam.
   d. Pelaksanaan investarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK.
   e. Pelaksanaan Pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) dalam satu daerah kota.
   f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
   g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian keruskan keanekaragaman hayati.
   h. Pemantaun dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
   i. Penyelesain konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
   j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
   k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
   l. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan tanah untuk produksi biomassa.
   m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
   n. Perencanaan, pelaksanaan pemantaun, penanggulangan dan pemulihan gambut.
   o. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan perubahan iklim.
   p. Perencanaan pelaksanaan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan non mineral
   q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah. Sedangkan fungsinya yaitu:

a. Perumusa kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
b. Perumusan dan penataan target pengurangan sampah;
c. Perumusan kebijkan penguruangan dan pemanfaatan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbulan sampah, pengunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam, pendaur uangan sampah dan pemanfataan sampah kebali dari produk dan kemasan produk;
e. Perumusan Kebjakan penanganan dan pemprosesan akhir sampah tingkat kota;
f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah;
g. Pelaksanaan penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu(TPST) Dan tempat pembungan akhir (TPA) sampah;
h. Pengawasan terhadap tempat pemprosesan akhir dengan sistem pembungan oen dumping;
i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemprosesan akhir sampah;
k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/ kota lain yang kemitraan dengan bahan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain(bahan usaha);
o. Pelaksanaan perencanaan, penyedian dan pemeliharaan fasilitas pendaurlangan sampah dan sarana prasana penanganan sampah;
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari **:**

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota
b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
c. Penyusunan konsep kebijakan penguruangan sampah
d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan smapah kepada prodesun/ industri dan usaha/ kegiatan
e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam
f. Pelaksanaan pembinaan perdaur ulangan sampah
g. Pelaksanaan pembinaan pemanfataan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Penanganan dan Pemprosesan akhir Sampah

a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemprosesan akhir sampah tingkat kota.
b. Perencanaan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah.
c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS) tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir(TPA) sampah
d. Pengawasan terhadap tempat pemprosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
f. Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemprosesan akhir sampah
g. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan bahan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
h. Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
i. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
j. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain(badan usaha)
k. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana

a. Penyedian fasilitas pendaur ulangan sampah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penyedian sarana dan prasarana pennganan sampah
c. Pemeliharaan sarana dan prasarana
d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan
e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang
f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana
g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan
h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan perawatan teknis operasional termasuk moda dan alat-alat berat/besar lainnya
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pegedalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemara lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sedangkan untuk fungsi dari bidang pengedalian pecemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu:

a. Perumusan dan Penyusunan pedoman dan tunjuk teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencermaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan intansi terkait
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah)
d. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratium lingkungan)
e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar insititusi dan non insititusi
f. Pelaksanaan sosialisai baku mutu lingkungan(air, udara, dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat
h. berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
i. Perumusan penyusunan kebijakan dan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengakutan bahan dalam satu daerah kota
j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3(tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota
k. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota
l. Pelaksanaan bimbingan teknis pengedalian pencemaran air, udara dan tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/ kegiatan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdiri dari:

a. Seksi pemanfaatan lingkungan
b. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan
c. Seksi pengelolaan bahan beracun dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun

7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang penataan dan peningkatan kapasitas hidup mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun fungsinya yaitu:

a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaran pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
b. Pelaksanaan penyelesaian sangketa lingkungan baik diluar pengendalian maupun melalui pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup daerah
f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegak hukum lingkungan dan penyidikan perkara penlanggaran lingkungan hidup
g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat(HMA). Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan atau pengetahuan tradisional dan hak MIIA terkait dengan perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup
h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
i. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
j. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup
k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan
l. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atau jasa layanan pengelolaan sampah
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terdiri dari:

a. Seksi penegakan hukum lingkungan
b. Seksi peningkatan kapasotas informasi dan komunikasi lingkungan
c. Seksi retribusi dan penagihan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru(Studi Kasus Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru) ini peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil Kesimpulan megenai Pengelolaan Sampah, Khususnya di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Adapun data dan hasil yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai pemberi gambaran dari responden penelitian, kemudian akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan Penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai Informan. Maka pap bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas informan dan hasil jawaban yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak informan. Identitas Responden berguna untuk megetahui beberapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi informan yang terdapat dalam peneliti.

1. Jenis Kelamin

Data Informan Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1: Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel V.1 :Klasifikasi Informan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Informan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	-
2	Seksi Sarana dan Prasarana	1	-
3	Pihak Ketiga	1	-
4	Masyarakat	2	
Jumlah		5	-
Presentase		100%	0

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan Hasil Tabel V.1 diatas dapat diketahui bawah Jenis Kelamin informan pada penelitian ini didominasi dengan jenis kelamin lali-laki dengan jumlah 5 orang dan perempuan tidak ada.

2. Usia Informan

Kemudian penulis akan menjelaskan pembagian informan berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah akan mengelompokkan umur Responden dengan tingkatan untuk mengetahui gambaran dari umur responden peneliti.

Tabel V.2: Disrtibusi Responden Penelitian Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<30	-	
2	31-40	2	40%
3	41-50	1	20%
4	>50	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dalam menentukan informan, juga dilihat faktor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seseorang menetukan pilihan. Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktifitas, dikarenakan tingkat usia seseorang selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang.

3. Pendidikan Informan

Secara Teoritas Pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat penelitian.

Tabel V.3 Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Informan	jumlah	Presentase
1	Tidak Sekolah	-	-	-
2	SD/Sederajat	Masyarakat	2	40%
3	SMP/Sederajat	-	-	-
4	SMA/Sederajat	Seksi Sarana dan Prasarana dan Pihak Ketiga	2	40%
5	S2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	20%
Jumlah			5	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian di Lapangan 2020

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan bagaimana tanggapan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru) dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Agoestino 2006:139) dimana indikator-indikator tersebut adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 (lima) orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul penelitiannya.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn (2006:142-143) Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realisitis dengan gosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Ukuran dan Tujuan Kebijakan adalah bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hamdanselaku Kepala seksi Penanganan dan Pemprosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru pada tanggal 03 September 2020, jam 13.30 WIB. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden:

"untuk kebijakan-kebijakan pembuangan sampah disana pihak pasar juga harus bisa mengatur kerjasama antara pihak dinas dengan pihak pasar, kemudian mereka yang menertibkan pengelolaan sampah seperti apa, apa dikumpulkan dulu atau lansung diangkat ke TPS yang ada di arengka."(03 september 2020)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda dengan Wawancara penulis Kepada Informan berikut:

Menurut bapak Syahriwandi *"untuk kebijakan dalam hal pembuangan sampah pihak pasar harus bisa bekerja sama dengan pihak dinas, kemudian barulah mereka yang akan menertibkan pembuangan sampah nya seperti apa sesuai dengan kesepakatan dengan lapak yang ada juga."(14 september 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa pihak dinas maupun pihak pasar harus bisa bekerja sama karena dalam pengumpulan sampah yang ada di perlukan kerjasama antara dua pihak yang bertanggung jawab. Agar pedagang yang ada tidak merasa bingung dalam hal pengumpulan sampah yang ada. Sehingga dibutuhkan satu kebijakan yang sama dari pihak pasar dan pihak dinas yang ada.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa pihak pasar dalam hal melakukan kebijakan terhadap pembuangan sampah, pihak pasar melakukan pengumpulan sampah terlebih dahulu barulah akan dibuang ke tempat pembuangan sementara, namun dalam hal pengangkutan nya dilakukan oleh pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketiga. Dinas yang ada menyerahkan tugas pembuangan sampah akhir pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan pengangkutan sampah jarang ditemui sesuai jam Kerja yang ada. Tak jarang sampah yang ada mengalami penumpukan, sehingga pengangkutan yang dilakukan tidak efektif karena volume sampah yang ada tidak sesuai dengan kapsitas angkutannya.

Selanjutnya penulis menyinggung permasalahan tentang tingkat Keberhasilan Kinerja Implementasi, sudah terpenuhi atau tidak.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:*"bahwa ia mengaku kinerja implementasi yang ada sudah cukup terpenuhi. Dinas Lingkungan dahulunya ada meletakkan binconteiner untuk tempat pembuangan sampah, agar sampah yang ada tidak berserakan. Namun hal itu juga tidak cukup membantu penumpukan volume sampah yanga ada."(03 september 2020)*

jawaban yang sama juga di ungkapkan Oleh Bapak Syahriwandi

"kinerja implementasi yang ada dirasa cukup baik. Karena pada saat itu dinas pernah meletakkan binconteiner untuk meminimalisir penumpukan sampah yang ada, tetapi hal itu tidak juga bisa menampung penumpukkan sampah yang ada. Binconteiner tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk sampah pasar, namun hal yang ditemui masyarakat yang ada juga membuang sampah diarea pasar hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab penumpukkan sampah.(14 september 2020)

Dari jawaban-jawaban informan yang penulis rangkum, maka dapat dilihat bahwa pihak dinas sebenarnya sudah pernah meletakkan binconteiner untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah. Namun hal tersebut juga tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada. Karena masyarakat yang ada juga ikut membuang sampah sehingga volume sampah yang ada semakin bertambah banyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis menemukan bahwa kinerja implementasi sudah cukup baik dalam pelaksanaan nya. Namun masyarakat yang ada juga ikut membuang sampah kepasar, yang seharusnya binconteiner hanya disediakan untuk sampah pasar saja. Akibatnya sampah yang ada mengalami penumpukan, yang akan menimbulkan masalah baru sperti masalah kesehatan pedagang maupun pengunjung pasar yang ada.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai cara untuk mencapai tujuan kebijakan tentang pengelolaan sampah di pasar pagi arengka. Berikut penjelasan yang dikatakan Bapak Hamdan:

"untuk pencegahan penumpukkan sampah dinas lingkungan sebelumnya sudah meletakkan binconteiner agar volume sampah yang banyak tidak berserakan ke jalan maupun di area pasar. Namun memang sebagian masyarakat yang membuang sampah di pasar jarang yang memasukkan sampah ke tempat yang sudah disediakan sehingga berakibat sampah tersebut berserakan."(03 september 2020)

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan Bapak Syahriwandi.

" bahwa dinas telah melakukan upaya dengan meletakkan binconteiner agar sampah yang ada tidak berserakan di area pasar. Namun masyarakat yang ada tetap melakukan pembuangan sampah di luar dari tempat yang sudah disediakan. Sehingga pengelolaan sampah menjadi terhambat karena sampah yang ada banyak berserakan dimana-mana"(14 september 2020)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mengurangi sampah yang berserakan dinas telah meletakkan binconteiner yang dimaksudkan agar sampah tidak berserakan. Namun karena bukan hanya pedagang yang membuang sampah di area pasar membuat sampah yang ada tidak dapat diangkut dengan baik. Dan jadwal pengangkutan yang tidak sesuai membuat kondisi sampah yang ada semakin menumpuk.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil Penelitian penulis menemukan bahwa Tujuan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas sudah cukup baik. Namun masyarakat yang membuang sampah ke area pasar tidak memasukkan sampahnya ke tempat yang telah disediakan. Sehingga sampah yang ada sering berserakan. Sampah yang menumpuk kadang menghasilkan kadar asam yang membuat pencemaran udara juga. Sehingga sampah yang ada pun harus cepat diangkut agar tidak menimbulkan masalah baru.

B. Sumberdaya

Menurut Van Metter dan Van Horn (2006:142-143) Sumberdaya ialah keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang peneliti lakukan Kepada Bapak Hamdan mengatatakan:

“ pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan seperti pengangkutan sampah yang dilakukan per shift agar penumpukan sampah yang ada tidak mengganggu masyarakat maupun pengujung pasar.”(03 september 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Syahriwandi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Sumber daya tidak ada masalah, selama kegiatan yang dilakukan tidak ada konflik atau pun komplain dari masyarakat dan pedagang yang ada maka kegiatan tersebut dianggap berjalan dengan baik."(14 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah selagi tidak ada masalah dengan masyarakat yang ada maka pekerjaan itu dianggap berjalan dengan baik.

Berdasarkan Hasil Penelitian penulis menemukan bahwa kegiatan pengelolaan terhadap keberhasilan kebijakan sudah cukup baik. Karena pekerjaan dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Jika dirasa pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai maka kebijakan yang ada tidak akan berhasil. Namun masalah sampah yang ada yang merasa terganggu datangnya pada pengguna jalan karena sampah yang berserakan seringkali mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sehingga pengguna jalan yang lewat meras terganggu.

Selanjutnya penulis juga Mewawancarai mengenai Sarana dan Prasaran dalam Pengelolaan Sampah Pasar Pagi yang telah disediakan.

Menurut Bapak Hamdan salah satu Informan Penulis bahwa ia menyatakan:

"sarana yang ada berupa TPS, mobil sampah yang disediakan oleh pihak pasar untuk kawasan area pasar, sampah -sampah yang ada itu diambilkan diletakkan di TPS luar, dari TPS dilanjutkan oleh tugas pihak ketiga untuk mengangkut sampah menuju TPA."(03 sepetember 2020)

Selanjutnya jawaban yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh Bapak Syahriwandi mengatakan:

"Sarana dan Prasarana yang ada sudah tersedia. Sarana yang ada seperti mobil pengangkut sampah maupun TPS. SDM yang ada dipasar berasal dari pihakm pasar begitu juga sebaliknya SDM yang ada pada pihak ketiga berasal dari pihak ketiga pula."(14 september 2020)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil Wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Sarana yang disediakan sudah terpenuhi walapun ada beberapa yang kurang dalam hal pengangkutan sampah seperti jaring penutup sampah yang terkadang dalam kondisi yang tidak layak. Sehingga sampah yang diangkut seringkali berserakan dijalanan karena kondisi jaring yang rusak.

Berdasarkan Hasil Penelitian penulis menemukan bahwa Kemampuan Sarana yang ada sebagian cukup baik kondisinya. Namun ada sebagian sarana yang kondisinya kurang baik seperti jaring pengangkut sampah yang seringkali sudah tidak layak dipakai tetapi masih tetap dipakai oleh pihak pengankut sampah. Hal ini juga menjadi pemicu seringkali sampah tersebut ketika diangkut menjadi berserakan dijalanan.

C. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatiaan pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasiaan kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Selanjutnya Penulis melakukan Wawancara mendalam tentang reaksi masyarakat terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Arengka.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:

"pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan seperti pengangkutan sampah yang dilakukan setiap pagi hari dan sore hari. Selama tidak terjadi konflik atau ada laporan-laporan negatif yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masuk kekontak kita maka berarti kegitan yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Dan masyarakat yang berada di sekitar sana mayoritas usaha bukan bermukim disana."(03 september 2020)

Menurut Bapak Syahriwandi mengatakan:

" bahwa jika tidak ada laporan dari masyarakat maka pekerjaan yang ada dianggap tidak mengganggu masyarakat yang ada. Masyarakat yang ada pun nyata nya bukan masyarakat yang tinggal di area pasar. Mereka mayoritas hanya usaha. Dan selagi tidak terjadi konflik atau ada laporan-laporan negatif yang masuk kekontak kita berarti kegiatan itu dianggap berjalan dengan lancar."(14 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang ada selama tidak mengganggu masyarakat maka dianggap berjalan dengan lancar dan tidak merugikan masyarakat yang ada di sekitar. Karena pada dasarnya masyarakat yang ada tidak bermukim disana melainkan hanya berjualan saja.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa reaksi masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Pagi cukup baik kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun pihak pasar tetap memperhatikan pendapat masyarakat. Jika dirasa kegiatan pengelolaan tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat maka kegiatan tersebut tidak berlanjut untuk dilakukan.

Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara mengenai organisasi formal dan informal yang terlibat didalam pengimplementasian kebijakan publik terhadap pengelolaan sampah di pasar pagi arengka.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:

"operasional persampahan ini sangat besar, tapi kita bukan bicara organisasi tapi kerjasama yang diikat dengan kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu , kita bekerjasama dengan pihak ketiga itu berdasarkan ide dari walikota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadikan kota pekanbaru kota percontohan bekerja dengan pihak ketiga ini bukan kita saja, jakarta gagal, surabaya berjalan untuk kita sumatera pencetus pertama, kita kota pekanbaru bekerja sama dengan pihak ketiga itu formalnya. Untuk informalnya kurang tau, kalau ada kepentingan-kepentingan disana contoh mereka orang pasar, mereka yang bagian sampah ini untuk dilansir sampah dari dalam untuk menuju TPS didepan, atau area pasarkan luas, bisa jadi dari pihak pasar mengcover."(03 september 2020)

Menurut Bapak Syahriwandi mengatakan:

"bahwa dalam formalnya dulu dinas yang mengcover semua pengangkutan sampah di protokol kecamatan dan pasar itu dimulai tahun 2015 dulu pada tahun 2014 pasar mengcover sampah pasar saja, di kecamatan hanya mengcover 24 ruas jalan protokol. Setelah 2015 kita kelola semua tapi manajemen pasar tetap dinas pasar hanya pengangkutan saja dinas kebersihan yang mengcover sampah itu. Kemudian untuk informalnya adalah dinas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanganan sampah. Gunanya adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dari dinas untuk operasional."(14 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pekanbaru merupakan merupakan kota pertama yang diidekan oleh Walikota sebagai Kota percontohan yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun ada beberapa kota yang melakukan hal ini mengalami kegagalan. Namun untuk informal dalam keterlibatan pengimplementasian kebijakan publik nya terhadap pengelolaan contohnya seperti mereka orang pasar maka pihak pasar juga yang akan mengcover segala masalah maupun kepentingan yang ada.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa Organisasi Formal dan Organisasi informal yang terlibat yaitu dalam kerja sama dinas dengan orang ketiga dinilai kurang efektif. Karena permasalahan yang ada tidak juga bisa terselesaikan. Sampah yang ada masih tetap sering menumpuk hingga ke Bahu jalan. Hal ini juga membuat jalan kota sering ditemui sampah yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berserakan. Karena volume sampah yang ada tidak sesuai dengan tempat yang sudah disediakan.

D. Sikap dan kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai sikap masyarakat terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik terhadap pengelolaan sampah dipasar pagi arengka kota pekanbaru.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:

"pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan seperti pengangkutan sampah yang dilakukan setiap pagi hari dan sore hari. Selama tidak terjadi konflik atau ada laporan-laporan negatif yang masuk kekontak kita maka berarti kegitan yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Dan masyarakat yang berada di sekitar sana mayoritas usaha bukan bermukim disana."(03 september 2020)

Jawaban yang tidak jauh berbeda diungkapkan Bapak Syahriwandi beliau mengatakan:

" bahwa jika tidak ada laporan dari masyarakat maka pekerjaan yang ada dianggap tidak mengganggu masyarakat yang ada. Masyarakat yang ada pun nyata nya bukan masyarakat yang tinggal di area pasar. Mereka mayoritas hanya usaha. Dan selagi tidak terjadi konflik atau ada laporan-laporan negatif yang masuk kekontak kita berarti kegiatan itu dianggap berjalan dengan lancar."(14 september 2020)

Lalu Penulis juga Mewawancarai Salah Satu Pihak Ketiga yang Mengelola Sampah yang ada di Pasar Arengka. Menurut Taufiqurahman sebagai staff Admin PT. Godang Tua Jaya divisi Pekanbaru mengatakan:

" khususnya pasar pagi itu termasuk kecamatan marpoyan damai, selama itu dari pihak masyarakat tidak ada masalah dan memberi support. Kalau misalnya secara teknik operasionalnya kalau ada armada datang, disana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disarankan pagi sampai jam 5 sore itu mengkondisikan harus bersih, kita upayakan supaya kondisi dibuat demikian. Selama ini masyarakat support tidak ada masalah. Dan disana ada juga untuk mengkoordinasikan. Jadi ketika sampah melimpah atau telat datang maka akan komunikasi dengan pihak PT. Godang Tua Jaya."(15 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat terhadap pelaksanaani kebijakan sangat mensupport dengan kebijakan yang diterapkan. Selama Pelaksanaan itu dijalankan belum ada komplain dari masyarakat. Karena masyarakat yang ada notabene nya tidak tinggal di pasar melainkan hanya untuk berjualan saja. Ketika pelaksanaan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat maka masyarakat meras tidak dirugikan.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan Bahwa Kordinasi Komunikasi antara Pihak Dinas dan Sikap masyarakat yang tidak ada melakukan komplain terhadap kebijakan yang dibuat. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang ada tidak merugikan masyarakat yang berjualan di area pasar.

Selanjutnya penulis juga menanyakan permasalahan bahwa ada tidak penolakan dari masyarakat didalam penerapan implementasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah di pasar pagi arengka kota pekanbaru.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:

"bahwa masyarakat mensupport dengan kebijakan yang ada. Karena selagi tidak ada komplain maka kebijakan yang dilaksanakan tidak merugikan masyarakat yang ada.Karena pekerjaan yang dilakukan ada yang mengkoodinasikan sehingga jika ada masalah yang ada maka akan dilaporkan langsung dengan pihak terkait."(03 september 2020)

Selanjutnya penulis juga mewancarai Bapak Syahriwandi beliau mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“ masyrakat yang ada mensupport segala kebijakan yang ada. Karena masyarakat yang ada hanya berjualan di pasar bukan bermukim. Jadi jika ada kebijakan masyarakat hanya mensupport saja selagi tidak merugikan masyarakat yang berjualan diarea pasar.”

Lalu penulis juga mewawancarai Pihak ketiga taufiqurahman mengatakan:

“ bahwa masyarakat ikut mensupport kebijakan yang ada. Karena jika terjadi masalah ada pihak koodinator yang akan melaporkan segala permasalahan yang terjadi dilapangan.”(15 september 2020)

Selanjutnya penulis mewawancarai pedagang mengenai adanya penolakan dari masyarakat didalam penerapan implementasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah dipasar pagi arengka kota pekanbaru.

Menurut Bapak Bustami salah satu pedagang dipasar arengka pekanbaru mengatakan:

“kalau untuk penolakan tidak ada Cuma dalam pelaksanaan kebijakan nya sering kali tidak sesuai. Seperti jadwal pengangkutan sampah yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.Sehingga seringkali sampah yang ada mengalami penumpukan.”(16 september 2020)

Menurut Dayat salah satu pedagang di pasar pagi arengka pekanbaru mengatakan;

“ masyarakat melakukan penolakan hanya saat kinerja yang diharapkan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.”(16 september 2020)

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa Sikap masyarakat yang ada juga mensupport segala Pelaksanaan yang dibuat untuk penangan sampah yang ada di pasar pagi arengka. Adapun masalah maka akan di koordinasikan dengan pihak koordinator yang ada. Dan juga penulis menemukan bahwa sikap masyarakat yang ada masih sering mengeluhkan tentang pelaksanaan yang diterapkan karena tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

E. Komunikasi Antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

Selanjutrnya penulis mewawancarai informan mengenai koordinasi komunikasi antara pihak dinas dan masyarakat yang terlibat didalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar pagi arengka kota pekanbaru.

Menurut bapak Hamdan mengatakan:

"didalam melakukan operasional pengangkutan armada pengangkut disaran kan mengangkut dari pagi sampai jam 5 sore agar sampah yang ada tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.dan jika ada masalah ada pihak koordinator yang berada di area pasar."(03 september 2020)

Menurut bapak syahriwandi mengatakan:

"komunikasi antara pihak dinas dan masyarakat ada pihak koordinator yang berada di area pasar tersebut. Misalkan terjadi masalah maka masyarakat akan menghubungi pihak dinas yang bersangkutan."(14 september 2020)

Selanjutnya menurut pihak ketiga yaitu bapak taufiqurahman mengatakan:

" koordinasi pihak dinas dengan masyarakat terjadi jika masyarakat ada kesulitan menghubungi kita, masyarakat sana menghubungi pihak dinas dan pihak dinas nanti yang akan menegur kita. Jika masalah yang dilaporkan oleh masyarakat tidak segera ditangani."(15 september 2020)

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat mengenai koordinasi komunikasi antara pihak dinas dan masyarakat yang terlibat didalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar pagi arengka kota pekanbaru.

Menurut bapak bustami mengatakan:

" komunikasi yang ada baik. Keluhan masyarakat ke dinas langsung di beritahu kepada pihak yang menjalankan tugas nya atau pihak yang berwenang."(16 september 2020)

Menurut dayat mengatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“ segala masalah yang ada akan langsung di sampaikan dinas kepada pihak yang menjalankan tugasnya.”(16 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi komunikasi pihak dinas dengan masyarakat ada pihak koodinator yang mengawasinya. Jika ada kesulitan pada masyarakat maka masyarakat akan menghubungi pihak dinas terkait dengan masalah yang ada.

Dari hasil Penelitian Penulis menemukan Bahwa Komunikasi yang dilakukan sering kali tidak ditangani dengan cepat. Sehingga masalah yang ada tidak tertangani dengan segera. Seringkali juga pihak ketiga tidak melakukan tugas nya dengan baik sehingga masalah sampah yang ada di pasar pagi tersebut seringkali terabaikan. Dan juga dalam menangani masalah yang ada menurut masyarakat pihak ketiga kurang memuaskan.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai informan mengenai sikap antara kepala pasar arengka dan pedagang dalam berkomunikasi mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut bapak Hamdan mengatakan:

“ bila ada masalah yang terjadi maka akan dilaporkan dulu kepada dinas terkait baru dinas yang nanti nya akan menghubungi pihak ketiga”(03 september 2020)

Lalu jawaban yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan bapak Syahriwandi:

“ masalah yang ada akan di laporkan kepada dinas terlebih dahulu barulah dinas yang akan menghubungi pihak ketiga untuk mengatasi masalah yang terjadi.”(14 september 2020)

Menurut taufiqurahman selaku pihak ketiga mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"bahwa bila ada komplain biasanya itu mengalir ke dinas terlebih dahulu. Pada tahun 2018 dulu banyak yang komplain tapi pada tahu 2019-2020 ini sudah membaik."(15 september 2020)

Selanjutnya penulis mewawancarai pedagang mengenai kepala pasar pagi arengka dan pedagang dalam berkomunikasi mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut bapak bustami mengatakan:

" jika ada masalah pedagang akan melaporkan kepada dinas baru dinas yang akan menindaknya atau menghubungi pihak ketiga."(16 september 2020)

Menurut dayat mengatakan:

"masalah yang ada akan dilapor kedinas dan dinas yang akan menyampaikan ke pihak ketiga mengenai permasalahn tersebut."(16 september 2020)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa maslaah yang ada akan dilaporkan kepada dinas terlebih dahulu baru nanti pihak dinas yang akan menghubungi pihak ketiga untuk mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan hasil Penelitian Penulis menemukan bahwa Komunikasi Dinas dengan Pihak Ketiga sering kali Pihak Ketiga tidak langsung mengatasi masalah yang ada. laporan yang terjadi di dinas sering kali tidak segera dilaksanakan oleh pihak ketiga hal ini juga yang menjadikan masalah yang ada tidak teratasi dengan segera.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van metter dan van horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya penulis mewawancarai mengenai cara menilai kinerja implementasi kebijakan yang telah diterapkan oleh dinas dilihat dari segi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:

"dari segi ekonomi pada bidang pengelolaan sampah seksi pemanfaatan dan pengurangan ada yang dijadikan pupuk kompos sehingga nilai ekonomi nya dapat. Lalu pupuk kompos tadi dijual dan beberapa di bagikan kepada masyarakat sekitar. Sehingga sampah yang ada tidak terbuang begitu saja.

Menurut Bapak Syahriwandi mengatakan:

"dari segi ekonomi nya sampah yang ada di kelola menjadi pupuk kompos. Lalu pupuk kompos tersebut dijual jadi sampah yang ada tidak terbuang begitu saja. Pupuk yang dibuat menghasilkan nilai ekonomis."(14 september 2020).

Lalu menurut Pihak Ketiga Taufiqurahman mengatakan:

"menurutnya kalau dijakarta itu pasar tradisional sebaiknya pengelolaan seperti ini harus diperbaiki. Bagusnya itu pasar punya bak besar yang diletakkan di belakang jangan didepan jalan jadi ketika armada datang tidak kelihatan proses pengangkutan sampah baiknya dialokasikan dana. Sehingga dari segi ekonominya pasti ada dampak positif ."(15 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sampah yanga ada masih memiliki nilai ekonomi.Sampah yang dikelola dapat dijadikan pupuk kompos yang juga dapat berguna bagi masyarakat.Sehingga sampah yang ada tidak terbuang begitu saja.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan Bahwa sampah yang dikelola oleh Dinas akan diberikan kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah adiwiyata. Yang beguna agar pupuk tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk Lingkungan tanaman yang ada.Pupuk yang dihasilkan pun sangat membantu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat maupun sekolah yang membutuhkan agar menghemat pengeluaran yang ada.

Lalu penulis juga mewawancarai mengenai masyarakat yang menerima implementasi kebijakan yang telah dibuat dalam hal pengelolaan sampah yang ada dipasar pagi arengka.

Menurut Bapak Hamdan mengatakan:

“ masyarakat menerima dengan segala kebijakan yang dibuat. Adapun masyarakat yang menolak itu karena kinerja yang dilakukan kurang sesuai selebihnya masyarakat tidak pernah mengeluh ataupun komplain dengan kebijakan yang ada.”(03 september 2020)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Syahriwandi:

“ bahwa masyarakat jarang melakukan komplain. Masyarakat hanya melakukan complain jika masalah kebijakan yang ada tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan.”(14 september 2020)

Lalu menurut pihak ketiga yaitu Bapak Taufiqurahman mengatakan:

“ menurut saya kurang memuaskan. Karena ia yakin saat menjalankan kebijakan pasti ada kekurangan. Misalnya mobil pengangkut sering parkir sembarangan pada saat pengambilan sampah.”(15 september 2020)

Lalu penulis juga mewawancarai pedagang di pasar pagi arengka kota pekanbaru:

Menurut Bapak Bustami mengatakan:

“ permasalahan yang ada selalu tetntang pengangkutan sampah. Seringkali sampah diangkut terlambat.Sehingga sering terjadi penumpukan.”(16 september 2020)

Menurut BapakDayat mengatakan:

“pengangkutan sampah sering terlambat dilakukan sehingga sampah yang ada makin menumpuk.”(16 september 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada masih sering kali pelaksanaan nya tidak sesuai dengan kebijakan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diterapkan. Masyarakat masih sering melakukan komplain karena sebagian kinerja tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa masyarakat Sosial masih sering melakukan komplain.Misalnya pada saat pengangkutan sampah sering kali mobil pengangkut parkir sembarangan sehingga membuat jalanan menjadi macetDan juga pada jadwal pengangkutan sampah sering kali tidak sesuai dengan jadwal dan membuat sampah yang ada semakin menumpuk hingga ke badan jalan.

C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Sampah (Khususnya Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Arengka)

Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru(DLHK) yang mana sebagai instansi yang bertanggung jawab mengenai Pengelolaan Sampah, yang memiliki tugas berkenan dengan Pengelolaan, Pengumpulan, Pemilihan, Pengangkutan secara hal yang dengan Progam Pemerintah yang ditugaskan Kepada pihak Ketiga yaitu PT. GODANG TUA JAYA, dan yang terjadi dilapangan masih ditemui hambatan-hambatan yang terjadi terhadap Pengelolaan Sampah terutama di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

Mengenai hambatan yang di alami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru(DLHK) terhadap Pengelolaan tersebut Adapun Hambatan yang dapat Penulis ketahui dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Kurangnya Kerjasama antara Pihak Pasar dan Pihak Ketiga dalam hal Pengelolaan Sampah, sehingga Sampah yang ada terlalu sering menumpuk dijalan,sehingga mengakibatkan ruas-ruas jalan di penuhi oleh sampah yang berserakan.
2. Masih minimnya Ketersedian TPS yang ada di pasar pagi arengka, sehingga jumlah TPS yang ada tidak bisa menampung jumlah sampah yang menumpuk.
3. Masih terjadinya ketidak tepatan waktu Pembuangan Sampah yang telah diterapkan Pemerintah kepada masyarakat dan Minimnya area Pengakutan sampah yang ada di Pasar pagi arengka sehingga terjadinya kemacetan akibat TPS yang adadi bahu jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan mendapatkan jawaban dari pertayaan melalui wawancara dan dituangkan pada Bab V, maka penulis Pengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di pasar pagi arengka kota pekanbaru).

Pertama, dari Ukuran dan Tujuan Kebijkan maka dapat disimpulkan bahwa pihak dinas maupun pihak pasar harus bisa bekerja sama karena dalam pengumpulan sampah yang ada di perlukan kerjasama antara dua pihak yang bertanggung jawab. Agar pedagang yang ada tidak merasa dalam hal pengumpulan sampah yang ada. Sehingga dibutuhkan satu kebijakan yang sama dari pihak pasar dan pihak dinas yang ada.

Kedua, berdasarkan Sumber Daya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana yang disediakan sudah terpenuhi walapun ada beberapa yang kurang dalam hal pengangkutan sampah seperti jaring penutup sampah yang terkadang dalam kondisi yang tidak layak. Sehingga sampah yang diangkut seringkali berserakan dijalanan karena kondisi jaring yang rusak.

Sedangkan yang *Ketiga,* Karateistik Agen Pelaksanadapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang ada selama tidak mengganggu masyarakat maka dianggap berjalan dengan lancar dan tidak merugikan masyarakat yang sekitar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena pada dasarnya masyarakat yang ada tidak bermukim disana melainkan hanya berjualan saja.

Sedangkan yang *Keempat,* Sikap atau Kecendrungan Para Pelaksana dapat disimpulkan bahwa masyarakat terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan sangat mensupport dengan kebijakan yang diterapkan. Selama kebijakan itu dijalankan belum ada komplain dari masyarakat. Karena masyarakat yang ada notabene nya tidak tinggal di pasar melainkan hanya untuk berjualan saja. Ketika kebijakan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat maka masyarakat meras tidak dirugikan.

Kelima, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dapat simpulkan bahwa masalah yang ada tetap akan di beritahu kan terlebih dahulu kepada pihak dinas. Lalu pihak dinas yang akan memberitahu masalah tersebut kepada pihak ketiga.

Keenam, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik penulis menemukan bahwa dinas menjadikan sampah sebagai pupuk kompos. Dan pupuk tersebut dibagikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah adiwiyata.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari peneliti ini, maka saran yang penulis ajukan berupa rekomendari yaitu:

1. Hendaknya Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih ikut serta dalam Pengelolaan Sampah Khususnya di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hendaknya Pt. Godang Tua jaya lebih ikut serta dalam memfasilitaskan Armada angkutan sampah yang sesuai dengan volume sampah yang ada.
3. Hendaknya Untuk lebih meningkatkan jumlah TPS yang ada sehingga Sampah yang berada dilokasi tidak berserakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan daeri Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Adisasmita, Raharjdjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Bugin & Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group

Ehrenberg, Ronald G., dan Smith, Robert S, 2003. Modern Labor Economic: Theorand Public Policy, Eight Edition. Person Education, Inc. New York City

Fata Zayinul. 2010. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Batik(Studi Kasus di Pasar Klewer, solo, Jawa Tengah). Tesis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hasan, Erlina 2005. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Rafika aditama.

Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian teori, Konsep dan pengembangan. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Leo, Agustino, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Mochtar, 1987. Etika Lingkungan. Jakarta. Kompas

Manik. K.E.S.2007. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Djembatan

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Maulidiah, Sri, 2014. Pelayanan Publik (Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan). Bandung: Indra Prahasta

Munaf, Yusri, 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II. Jakarta: Renika Cipta

Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2. Jakarta:Renika Cipta

Purwanto, 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka belajar

Ripley, Rendal B.and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementasi and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis

Sumaryadi, Nyoman I. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama

Syafiie, Kencana.2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Kencana Inu, 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, PT. Refika Aditama

Thoha, Miftah. 1995. Kepemimpinan dalam Menajemen. Suatu Pendekatan Prilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. MNC

Jurnal :

Andi, Sriati, Andy. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten purbalingga. jurnal administrasi Publik : 1- 14

Putri Irna Desih. 2017 Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah kota pekanbaru (studi kasus kecamtan tampan), Jurnal Administrasi Publik, 4(2) : 1-12

Widia Wira Dinasti. 2015. Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Jurnal Administrasi Publik, 2(2) : 1-9

IriendaRielasari. 2018 PengelolaanSampah Kota Pekanbaru, JurnalAdministrasi Publik,5(1):4-9

Dokumentasi :

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang – Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitihan (UP), Hasil Penelitihan (SKRIPSI), Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), 2013. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :